

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dengan baik dalam suatu negara, karena keuangan negara bisa menjadi alat untuk mengembangkan perekonomian negara serta untuk mewujudkan cita-cita negara. Pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Tentunya dalam pengelolaannya tidak lepas dari peran seorang bendahara. Terdapat beberapa cara yang bendahara lakukan yaitu melakukan pembukuan, pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) serta membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara adalah bentuk pertanggungjawaban atas kas yang dikelolanya. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara disusun oleh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, dengan mengacu pada Buku Kas Umum, beberapa Buku Pembantu, serta Buku Pengawasan Anggaran Bendahara. Untuk bendahara Laporan Pertanggungjawaban Bendahara kemudian disampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga, serta BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan). Seluruh satuan kerja harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara disampaikan setiap bulan dengan dilampiri oleh salinan rekening koran.

Mengenai laporan pertanggungjawaban tersebut, sudah ada beberapa regulasi yang mengatur di Indonesia, yaitu terdapat pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, kemudian terdapat Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 27 tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 3 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Selain itu, juga terdapat Peraturan Menteri Keuangan No 230 tahun 2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan adanya berbagai relasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan serta pertanggungjawaban bendahara sangat penting dalam pelaksanaan APBN, oleh karena itu pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku sangat penting untuk dilakukan dengan baik oleh bendahara setiap satuan kerja, baik oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis ingin melakukan tinjauan terhadap penatausahaan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di lingkungan KPPN Surabaya II, dalam tinjauan ini penulis juga akan membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan penatausahaan laporan pertanggungjawaban dengan aturan yang berlaku, selain itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kepatuhan satuan kerja terhadap aturan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada KPPN Surabaya II, Berdasarkan rencana kerja yang tertuang dalam website Ditjen Perbendaharaan Kemenku RI KPPN Surabaya II, Target presentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal yaitu 98,1%, serta target presentase Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang andal dan tepat waktu yaitu 98% (Hardiputra, 2021).

Dilihat dari target rencana kerja tersebut KPPN Surabaya II cukup optimis mengenai proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dikelolanya. Hal tersebut tentunya merupakan proyeksi dari pencapaian tahun sebelumnya, penulis tertarik untuk membahas mengenai kualitas penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara apakah sudah memenuhi target atau belum, penulis juga ingin mengetahui penatausahaan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai aturan yang berlaku atau masih memerlukan penyesuaian, selanjutnya mengenai prosedur yang diterapkan kepada satuan kerja yang telat menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dampak keterlambatan tersebut terhadap KPPN Surabaya II, serta penulis juga tertarik untuk mengetahui perlakuan terhadap satuan kerja yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara, adakah

kendala dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban, lalu jika ada akan dibahas bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Penulis berharap dengan dilakukannya penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan mengenai penatausahaan laporan bendahara pengeluaran khususnya yang berlaku di lingkungan KPPN Surabaya II. Selain itu, jika hasil tinjauan ini ternyata kualitas penyampaian LPJ memenuhi rencana kerja 2021 yang disusun sebelumnya maka strategi penatausahaan yang dimiliki KPPN Surabaya II dapat menjadi acuan bagi KPPN lainnya yang memiliki presentase penyampaian laporan pertanggungjawaban yang masih belum maksimal dapat lebih memaksimalkan kembali prosesnya. Untuk satuan kerja KPPN Surabaya II sendiri penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta dapat menambah motivasi bagi KPPN Surabaya II untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang dikelolanya khususnya mengenai penatausahaan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran di lingkungan kerjanya.

Seluruh hasil Tinjauan yang dilakukan penulis tersebut nantinya akan dicantumkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penatausahaan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II?
- b. Bagaimana dampak keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran di lingkungan KPPN Surabaya II?
- c. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses Penatausahaan dan penyampaian Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui proses penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II.
- b. Untuk mengetahui dampak keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II.
- c. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses Penatausahaan dan penyampaian Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dibatasi yaitu hanya dalam lingkungan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Penulis juga berencana untuk melakukan pengambilan data pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yaitu mulai tanggal 14 Februari sampai 13

April 2022. Kemudian untuk data laporan pertanggungjawaban yang akan dilakukan tinjauan juga dibatasi hanya milik Bendahara pengeluaran, karena pada dasarnya tidak semua satker memiliki bendahara penerimaan, hanya satker yang memiliki potensi penerimaan PNBPN yang memiliki Bendahara penerimaan sehingga penulis memilih membatasi hanya milik Bendahara pengeluaran. Untuk periode data yang diambil adalah fokus pada data LPJ 2021, namun terdapat beberapa data LPJ tahun 2022 yang akan menjadi acuan dan bahan tinjauan untuk meninjau kesesuaian proses penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada lingkungan kerja KPPN Surabaya II. Pembatasan ruang lingkup penulisan tersebut dilakukan agar memudahkan penulis dalam proses pengumpulan data serta agar penulis dapat menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Pengambilan data juga dilakukan selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan agar data dapat diperoleh sebelum perkuliahan dimulai sehingga penulis memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengolahan data.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai penatausahaan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran khususnya di lingkungan KPPN Surabaya II.
- b. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai tata cara dan mekanisme penulisan Karya Tulis Ilmiah yang baik dan benar.

- c. Dapat mengimplementasikan pemahaman yang telah penulis dapatkan selama mata kuliah tersebut berlangsung dalam proses kegiatan belajar dan mengajar di perkuliahan.
- d. Dapat menjadi motivasi dan acuan bagi KPPN lainnya khususnya yang masih belum maksimal dapat lebih memaksimalkan kembali prosesnya.
- e. Dapat memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban, serta dapat menambah motivasi bagi KPPN Surabaya II untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang dikelolanya khususnya mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban di lingkungan kerjanya.

1.6 Sistematika Penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERNYATAAN LULUS

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

- 1.3 Tujuan Penulisan
- 1.4 Ruang lingkup Penulisan
- 1.5 Manfaat Penulisan
- 1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Tinjauan
- 2.2 Penatausahaan Kas
- 2.3 Bendahara Pengeluaran
 - 2.3.1 Pengertian Bendahara Pengeluaran
 - 2.3.2 Tugas, Wewenang, dan Fungsi Bendahara Pengeluaran
- 2.4 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

- 3.1 Metode pengumpulan data
 - 3.1.1 Studi kepustakaan
 - 3.1.2 Studi Lapangan
 - 3.1.2.1 Wawancara
 - 3.1.2.2 Observasi
- 3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian
 - 3.2.1 KPPN Surabaya II
 - 3.2.1.1 Sejarah KPPN Surabaya II
 - 3.2.1.2 Visi, Misi, dan Moto KPPN Surabaya II
 - 3.2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi KPPN Surabaya II
 - 3.2.1.4 Struktur Organisasi KPPN Surabaya II

3.2.2 Cakupan Wilayah Kerja KPPN Surabaya II

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Proses Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II

3.3.2 Dampak Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II

3.3.3 Solusi yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala dalam Proses Penatausahaan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

RIWAYAT HIDUP PENULIS